

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

2.1 Teori yang Relevan dengan Penelitian

2.1.1 Tinjauan tentang Kesiapsiagaan

Tinjauan kesiapsiagaan dibawah ini dapat dilihat beberapa definisi kesiapsiagaan menurut UU No.24 tahun 2007 serta menurut para ahli.

2.1.1.1 Definisi Kesiapsiagaan

Menurut LIPI-UNESCO/SDR (2006:5) yang mengatakan bahwa: “Kesiapsiagaan adalah tindakan-tindakan yang memungkinkan pemerintah, organisasi, masyarakat, komunitas dan individu untuk mampu menanggapi suatu situasi bencana secara cepat dan tepat guna. Termasuk kedalam tindakan kesiapsiagaan adalah penyusunan rencana penanggulangan bencana, pemeriharaan sumber daya dan pelatihan personil.”

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007, Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Kesiapsiagaan merupakan bagian dari upaya yang dilakukan sebelum terjadinya bencana, sehingga masyarakat menjadi waspada dan tanggap terhadap bencana. Hal ini mencakup pelatihan, gladi, penyiapan sarana dan prasarana, SDM, logistik dan pembiayaan. Dengan kesiapsiagaan yang tepat diharapkan upaya penanggulangan dapat lebih cepat dan tepat sehingga dapat meminimalisir jumlah korban dan kerusakan.

LIPI-UNESCO/SDR (2006:7), konsep kesiapsiagaan yang digunakan pada kajian kerangka penelitian kesiapsiagaan masyarakat di sini lebih ditekankan pada

penyiapan kemampuan untuk dapat melaksanakan kegiatan tanggap darurat secara cepat dan tepat. Kegiatan tanggap darurat meliputi langkah-langkah tindakan sesaat sebelum bencana, seperti: peringatan dini meliputi penyampaian peringatan dan tanggapan terhadap peringatan, tindakan saat terjadi bencana seperti: melindungi/menyelamatkan diri, melindungi nyawa dan beberapa jenis benda berharga, tindakan evakuasi dan tindakan yang harus dilakukan segera setelah terjadi bencana seperti SAR, evakuasi, penyediaan tempat berlindung sementara, perawatan darurat, dapur umum, bantuan darurat, survei untuk mengkaji kerusakan dan kebutuhan-kebutuhan serta perencanaan untuk pemulihan segera (infrastruktur krisis, sarana sosial, seperti: pendidikan dan ibadah).

Definisi kesiapsiagaan menurut Nurjanah, et al. (2012:42) mengatakan bahwa kesiapsiagaan adalah pemikiran-pemikiran tentang kebutuhan yang akan timbul jika terjadi bencana dan memastikan sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dengan demikian, kesiapsiagaan akan membawa manusia di daerah rawan bencana pada tataran kesiapan/kesiapsiagaan yang lebih baik dalam menghadapi bencana.

Kesiapsiagaan meletakkan aturan-aturan penanggulangan kedaruratan sedemikian rupa sehingga menjadi lebih efektif termasuk kegiatan penyusunan dan uji coba kontinjensi, pengorganisasian, memasang, dan menguji sistem peringatan dini, logistik kebutuhan dasar, pelatihan dan prosedur tetap.

2.2.1.2. Aspek-aspek Kesiapsiagaan

Terlepas dari definisi diatas, terlihat bahwa kesiapsiagaan suatu komunitas selalu tidak terlepas dari aspek-aspek lainnya dari kegiatan pengelolaan bencana (tanggap darurat, pemulihan dan rekontruksi, pencegahan dan kesiapsiagaan). Cara

menjamin tercapainya suatu tingkat kesiapsiagaan tertentu, diperlukan berbagai langkah prabencana, sedangkan keefektifan dari kesiapsiagaan masyarakat dapat dilihat dari implementasi kegiatan tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana. Pada saat pelaksanaan pemulihan dan rekonstruksi pasca-bencana, harus dibangun mekanisme kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan bencana berikutnya.

Penelitian ini mengadopsi dari kerangka kerja (framework) UNESCO-LIPI (2007:13-14) yang dibuat untuk melihat tingkat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam Terdapat lima faktor kritis sebagai parameter penelitian, yaitu pengetahuan dalam pengurangan risiko bencana, kebijakan dalam pengurangan risiko bencana, sistem peringatan bencana, kemampuan untuk memobilisasi sumber daya masyarakat yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengetahuan

Pengetahuan selalu dijadikan sebagai awal dari sebuah tindakan dan kesadaran seseorang, sehingga dengan kapasitas pengetahuan diharapkan bisa menjadi dasar tindakan dengan seseorang. Peningkatan kesadaran masyarakat dan pemberian informasi mengenai kerawanan, bahaya, dan risiko bencana pada tataran masyarakat, akan meningkatkan pengetahuan dalam mengantisipasi dan mengurangi risiko bencana yang terjadi.

2. Kebijakan

Beberapa faktor yang bisa menyebabkan risiko bencana seperti pengelolaan lingkungan, struktur bangunan, dan peraturan lain yang berpengaruh terhadap risiko bencana menjadi hal penting bagi wilayah rawan bencana. Kebijakan akan menjadi panduan, dan petunjuk yang harus dilaksanakan dalam tindakan yang konkrit. Berbagai kebijakan dan program perlu disusun dan diterapkan secara besar untuk mengantisipasi bencana yang terjadi.

3. Rencana Tanggap Darurat

Rencana ini menjadi bagian penting dalam kesiapsiagaan, terutama berkaitan dengan evakuasi, pertolongan dan penyelamatan agar korban bencana dapat diminimalkan. Upaya ini sangat penting, terutama saat terjadi bencana dan hari-hari pertama setelah bencana sebelum bantuan dari pemerintah dan bantuan dari luar datang

4. Sistem Peringatan Bencana

Aktivitas-aktivitas kesiapan untuk serangan bencana seringkali bervariasi dibanding serangan-serangan yang bersifat lambat mungkin memerlukan keterlibatan yang lebih aktif pada sistem peringatan dini sebagai sebuah pengembangan dari kesiapsiagaan bencana. Sistem peringatan dini adalah proses memonitor situasi dalam masyarakat atau area-area yang dikenal rentan terhadap bahaya-bahaya serangan yang lambat.

5. Mobilisasi Sumber Daya

Setiap individu, kelompok maupun unit sosial yang lebih besar, sesuai dengan kultur yang dimiliki pada umumnya memiliki dan senantiasa mengembangkan kapasitas sistem penyesuaian dalam merespon ancaman. Respon tersebut dapat bersifat jangka pendek yang disebut mekanisme penyesuaian atau yang lebih berjangka panjang yang dikenal sebagai mekanisme adaptasi. Memobilisasi sumber daya ini terutama bertujuan untuk mengakses kebutuhan dasar, keamanan, sandang, pangan, dan memperkuat sumber-sumber kehidupan.

Tidak jauh dengan pendapat LIPI, Nurjanah, et al. (2012:53) menyebutkan bahwa dalam kesiapsiagaan terdapat beberapa aspek antara lain:

1. Penyusunan dan Uji Coba Rencana Kontinjensi

Perencanaan kontinjensi merupakan salah satu aspek dari kesiapsiagaan.

Menurut Favourita, et al. (2010:61):

“Perencanaan kontinjensi dapat didefinisikan sebagai proses keadaan ketidakpastian, dimana skenario dan tujuan sudah disepakati, tindakan- tindakan manajerial dan teknis sudah ditentukan, dan rancangan mencegah atau menganggapi keadaan darurat”.

Perencanaan kontinjensi dapat dicapai dengan baik melalui upaya-upaya kerjasama dan koordinasi dimana semua pihak yang terlibat bekerja bersama- sama dengan tujuan-tujuan yang sama selama kurun waktu tertentu dan melakukan pertemuan meja bundar menekankan semua pihak penting. Peserta dalam perencanaan kontinjensi meliputi mereka yang ikut terlibat dalam tanggap darurat, termasuk pemerintah, dan para ahli.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber, dan lingkungannya. Penanganan bencana tidak akan berhasil baik jika tidak didukung oleh pengorganisasian, baik pada level teknis maupun level strategis. Menurut Sochatman Ramli (2010:54), tanpa pengorganisasian yang baik dan rapi, penanganan bencana akan kacau dan lamban sehingga tidak efektif. Oleh karena itu , salah satu elemen penting dalam sistem manajemen bencana adalah penetapan organisasi dan tanggung jawab yang jelas.

3. Memasang dan Pengujian Sistem Peringatan Dini

Peringatan dini merupakan salah satu aspek penting dalam penanggulangan bencana. Menurut Nurjanan, et al. (2012:53), peringatan dini dimaksudkan sebagai

serangkaian proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis serta diseminasi informasi tentang keberadaan bahaya/peningkatan keadaan bahaya. Peringatan dini digunakan untuk mengantisipasi eskalasi bahaya, mengembangkan strategi tanggapan/respon dan untuk bahan pengambilan keputusan terhadap kemungkinan akan segera terjadi bencana.

Tujuan dari sistem peringatan dini menurut Nurjanah, et al. (2012:53) adalah untuk menurunkan kualitas dan kuantitas jumlah korban bencana melalui peningkatan aksesibilitas informasi. Pemberian peringatan dini harus menjangkau masyarakat, segera, tegas dan tidak membingungkan, dan bersifat resmi. Peringatan dini dilakukan melalui kegiatan pengamatan gejala bencana, analisis hasil pengamatan gejala bencana, pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang, penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana dan pengambilan tindakan oleh masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Sistem peringatan dini yang terpusat pada masyarakat adalah merupakan suatu sistem yang peringatannya diberikan tepat pada waktunya dan dapat dimengerti oleh individu dan masyarakat yang menghadapi risiko bencana.

4. Logistik Kebutuhan Dasar

Nurjanah, et al. (2012:77) mengatakan bahwa logistik merupakan kegiatan pengadaan dan penyaluran suplai (bahan pasokan), jumlah, kualitas, kondisi, keamanan, tempat, dan waktu yang tepat. Istilah logistik dimasa lalu disebut

"*supplies and transport*" merupakan komponen utama yang sangat penting khususnya dalam operasi tanggap darurat. Logistik dapat diartikan sebagai suatu yang berwujud untuk pemenuhan kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, papan, kesehatan, yang digunakan dalam penanggulangan bencana.

Kegiatan manajemen logistik dan peralatan meliputi inventarisasi, pemenuhan kebutuhan, pengadaan, pergudangan, pendistribusian, dan penghapusan. Manajemen logistik dan peralatan diperlukan untuk mengendalikan secara holistik persediaan dan kebutuhan holistik dan peralatan multi-lokasi, multi- *hazard* dan terpadu antara instansi/organisasi/ pemangku kepentingan.

5. Pelatihan dan Prosedur Tetap Lainnya

Dalam rangka menyiapkan masyarakat menghadapi bencana untuk mengurangi jatuhnya korban akibat bencana, maka dalam kurikulum pendidikan formal perlu diakomodasikan materi tentang kebencanaan/penanggulangan bencana khususnya masa kedaruratan bencana, termasuk melakukan pelatihan dalam menghadapi kedaruratan bencana.

Pelatihan/simulasi sangat diperlukan baik untuk petugas maupun untuk masyarakat yang akan terkena bencana. Pendidikan dan pembinaan yang dilakukan secara formal maupun informal misalnya melalui tokoh-tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, media massa dan jalur lainnya.

Pelatihan/simulasi yang diperlukan berkaitan dengan manajemen risiko bencana misalnya menurut Soehatman Ramli (2010:63-64):

- 1) Pemahaman mengenai manajemen risiko dapat diberikan bagi petugas, pejabat, pengawas, atau pimpinan perusahaan/organisasi. Diharapkan mereka memiliki wawasan mengenai manajemen bencana termasuk perundangannya sehingga mampu mengembangkan dilingkungan masing-masing. Pemahaman mengenai

analisis risiko bencana sehingga anggota masyarakat mampu menyusun dan menilai suatu analisa risiko bencana.

- 2) Pemahaman mengenai penanganan suatu bencana menurut jenisnya, misalnya bencana alam, non-alam, dan sosial.
- 3) Pengetahuan umum mengenai bencana untuk meningkatkan kesadaran serta kepedulian anggota masyarakat antara lain melalui lembaga pendidikan mulai tingkat terendah sampai tingkat menengah.

Pelatihan dan pembinaan dapat dibagi dua yaitu pelatihan dan pembinaan tim teknis, dan pelatihan dan pembinaan masyarakat. Menurut Soehatman Ramli (2010:64) tim teknis yang terlibat dalam penanggulangan bencana harus terlihat dan diberi pembinaan berkala mengenai cara penanggulangan bencana antara lain.

- 1) Teknik melakukan pertolongan seperti rescue atau penyelamatan lainnya.
- 2) Teknis bantuan medis (P3K) dan bantuan medis lainnya.
- 3) Pemahaman prosedur tanggap darurat dengan melakukan simulasi.

Menurut Soehatman Ramli (2010:64-65), anggota masyarakat perlu diberi pembinaan dan pelatihan mengenai bencana yang mencakup antara lain:

- 1) Pemahaman mengenai jenis dan bentuk bencana yang mungkin terjadi di lingkungan masing-masing.
- 2) Cara dan teknik penyelamatan ketika bencana terjadi.
- 3) Peralatan keselamatan yang tersedia dan penggunaannya.
- 4) Kemampuan memberikan pertolongan pertama sebelum tim medis datang

2.1.2 Tinjauan tentang Tokoh Masyarakat

Dalam kamus umum bahasa Indonesia, tokoh diartikan sebagai rupa, wujud dan keadaan, bentuk dalam arti jenis badan, perawakan, orang yang terkemuka atau

kenamaan didalam lapangan politik suatu masyarakat. Sedangkan masyarakat, ialah sekumpulan individu atau sejumlah manusia yang terikat dalam satu kebudayaan yang sama. Pertanyaan yang kemudian yang muncul adalah, siapakah tokoh masyarakat itu? Apa saja kaitan antara tokoh masyarakat dengan perkembangan masyarakat? Menurut Surbakti (1992:40) mengatakan bahwa tokoh masyarakat ialah seseorang yang disegani dan dihormati secara luas oleh masyarakat dan dapat menjadi faktor yang menyatukan suatu bangsa-negara.

Tokoh masyarakat, tentunya merupakan representasi dari adanya sifat-sifat kepemimpinan yang menjadi acuan bagi masyarakat dalam mewujudkan harapan serta keinginan-keinginan masyarakat sehingga tokoh masyarakat, tidak bisa dilepaskan dari sifat kepemimpinan yang tercermin didalam diri tokoh masyarakat tersebut. Kepemimpinan ini kemudian menjadi panutan, sebab warga masyarakat mengidentifikasikan diri kepada sang pemimpin, dan ia dianggap sebagai penyambung lidah masyarakat. Berdasarkan masyarakat yang tengah membebaskan diri dari belenggu penjajahan, biasanya muncul pemimpin yang kharismatik untuk menggerakkan massa rakyat mencapai kemerdekaannya. Kemudian pemimpin ini muncul sebagai simbol persatuan bangsa, seperti tokoh dwitunggal Soekarno-Hatta di Indonesia dan Joseph Bros Tito di Yugoslavia. Dalam hal ini tokoh masyarakat adalah merupakan orang-orang yang dihormati dan disegani dalam masyarakatnya.

2.1.3 Tinjauan tentang Bencana Alam

2.1.3.1 Definisi Bencana Alam

Menurut Sochatman Ramli (2010:18) bencana alam terjadi sepanjang tahun diberbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Jenis bencana alam sangat banyak

beberapa diantaranya sebagai berikut:

1. Gempa

Gempa merupakan kejadian alam yang paling sering dan banyak menimbulkan korban. Menurut kejadiannya, gempa merupakan gejala berupa sentakan alamiah yang terjadi di bumi, yang sumbernya di dalam bumi dan merambat ke permukaan. Terdapat dua jenis gempa bumi menurut kejadiannya yaitu gempa tektonik dan vulkanik.

2. Tsunami

Tsunami diperkirakan terjadi karena adanya perpindahan badan air yang disebabkan perubahan muka laut secara vertikal dengan tiba-tiba yang disebabkan oleh berbagai faktor. Penyebabnya antara lain karena gempa bumi yang berpusat di bawah laut, letusan gunung api bawah laut, dan longsor bawah laut.

3. Letusan gunung api

Indonesia adalah daerah bergunung api sehingga bencana letusan gunung api sering terjadi antara lain Gunung Krakatau, Merapi, Galunggung dan lainnya.

4. Longsor

Longsor merupakan gejala alam untuk mencapai terganggunya kondisi kestabilan kawasan. Seperti halnya banjir, sebenarnya gerakan tanah merupakan bencana alam yang dapat diramalkan kedatangannya, karena berhubungan dengan besar curah hujan.

5. Lahan dan hutan

Suatu kondisi dimana lahan dan hutan dilanda api yang mengakibatkan kerusakan lahan dan hutan atau hasil hutan dan berakibat kerugian ekonomis dana

atau nilai lingkungan

6. Angin badai

Angin badai adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan angin 120 km/jam atau lebih sering terjadi di wilayah tropis di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat dekat dengan khatulistiwa. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca .

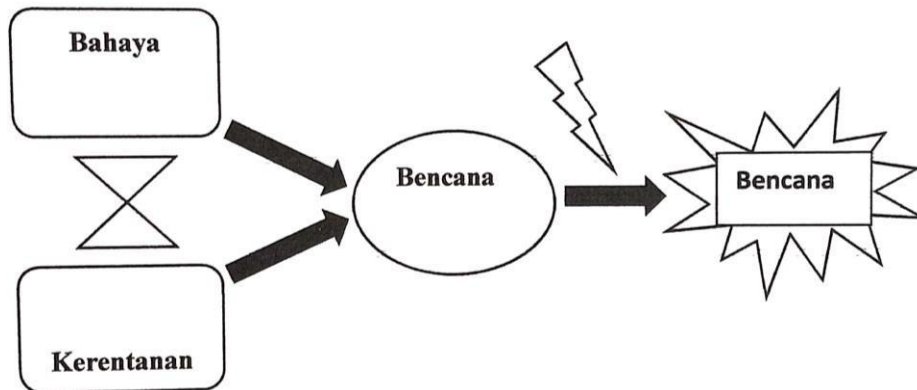
Terdapat juga Pengertian korban bencana alam menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012. Korban bencana alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan gempa bumi sehingga terganggu fungsi sosialnya.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan, bencana merupakan suatu peristiwa yang mengancam pada aspek-aspek kehidupan, dan fungsi masyarakat, dimana ancaman tersebut melampaui kemampuan masyarakat untuk mengatasinya. Mengakibatkan kerugian bagi kehidupan manusia baik secara materi, lingkungan dan psikologis.

2.1.3.2 Proses Terjadi Bencana

Sebuah peristiwa baru dapat disebut bencana ketika manusia yang terkena dampak oleh peristiwa itu tidak mampu untuk menanggulangnya sehingga pada akhirnya terkena dampak yang merugikan. Kerentanan manusia terhadap dampak gejala alam, sebagian besar ditentukan oleh tindakan manusia atau kegagalan manusia untuk bertindak. Jika diamati, bencana terjadi karena adanya pertemuan antara bahaya dan kerentanan, serta ada pemicunya. Nurjanah (2013:14)

menjelaskan proses terjadinya bencana melalui diagram, sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Proses terjadinya Bencana
Sumber : Buku Manajemen Bencana 2013

Melalui proses tersebut diketahui bahwa bencana terjadi karena adanya unsur bahaya, kerentanan, serta risiko bencana. Nurjanah (2013:14) menyebutkan bahwa besar-kecilnya risiko bencana sangat ditentukan oleh tingkat kerentanan. Apabila masyarakat sudah memahami bencana dan karakteristiknya serta sudah memiliki kemampuan tentang penanganan bencana, maka tingkat kerentanan masyarakat tersebut kecil. Penjelasan mengenai proses terjadinya bencana dijelaskan dibawah ini :

1. .Bahaya (*Hazard*)

Pada umumnya bahaya merupakan suatu ancaman yang dapat ditimbulkan oleh gejala alam maupun oleh kegiatan yang dilakukan manusia. Seperti yang dikatakan Nurjanah (2013:15) bahaya adalah suatu fenomena alam atau buatan yang mempunyai potensi mengancam kehidupan manusia, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan. Bahaya merupakan akibat proses-proses yang terjadi dari dalam bumi dan dari luar bumi, ditunjukkan dengan pergerakan kulit bumi,

pembentukan gunung api, pengangkatan daerah dataran menjadi pegunungan yang merupakan bagian dari proses internal atau dari dalam bumi. Sedangkan proses eksternal atau dari luar bumi yaitu berupa hujan, angin, serta fenomena iklim lainnya cenderung melakukan perusakan morfologi melalui proses degradasi (pelapukan batuan, erosi, dan abrasi).

2. Kerentanan (*Vulnerability*)

Kerentanan bencana adalah suatu kondisi yang menjadikannya mudah terkena dampak bencana dan sulit untuk pulih. Nurjanah (2013:16) menyebutkan bahwa kerentanan merupakan suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bahaya. Tingkat kerentanan adalah salah satu faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya bencana, karena bencana baru akan terjadi apabila adanya suatu ancaman atau bahaya pada suatu kondisi yang rentan.

3. Risiko Bencana (*Disaster Risk*)

Risiko bencana merupakan kemungkinan yang terjadi atau ditimbulkan dari bahaya dan kerentanan. Nurjanah (2013:18) menjelaskan risiko bencana adalah interaksi antara tingkat kerentanan daerah dengan ancaman bahaya yang ada. Ancaman bahaya, khususnya bahaya alam bersifat tetap karena bagian dari dinamika proses alami. Sedangkan tingkat kerentanan daerah dapat dikurangi, sehingga kemampuan dalam menghadapi ancaman tersebut semakin meningkat. Secara umum, risiko dapat dirumuskan sebagai berikut:

<p>$R = F (\text{Bahaya} * \text{Kerentanan} / \text{Kemampuan})$</p> <p>Keterangan :</p> <p>R: Risiko</p> <p>F: Fungsi</p> <p>*: Kali</p> <p>/ : Bagi</p>

Gambar 2.2 Rumusan Bencana

Sumber: Buku Manajemen bencana 2013

Kaitan bahaya menunjukkan kemungkinan terjadinya bencana baik akibat gejala alam maupun akibat non-alam/manusia di suatu tempat. Kerentanan menunjukkan kerawanan yang dihadapi suatu masyarakat dalam menghadapi ancaman. Ketidakmampuan merupakan kelangkaan upaya atau kegiatan untuk mengurangi korban jiwa atau kerusakan. Dengan demikian semakin tinggi bahaya, kerentanan dan ketidakmampuan, akan semakin besar pada risiko bencana yang dihadapi dan kerugian yang akan dirasakan.

2.1.3.3 Faktor-Faktor Penyebab Bencana

Secara umum faktor penyebab terjadinya bencana adalah karena adanya interaksi antara bahaya atau ancaman (*hazard*) dan kerentanan (*vulnerability*). Nurjanah dkk (2013:21) menyebutkan terdapat 3 (tiga) faktor penyebab terjadinya bencana, yakni:

1. Faktor Alam (*natural disaster*);
2. Faktor Non-alam (*non-natural disaster*);
3. Faktor Sosial (*man-made disaster*);

Faktor alam disebabkan oleh fenomena atau peristiwa alam yang terjadi tanpa adanya campur tangan manusia. Faktor non-alam yaitu bencana yang bukan oleh fenomena atau peristiwa alam maupun perbuatan manusia. Sedangkan faktor sosial yaitu murni disebabkan oleh perbuatan manusia, misalnya konflik horizontal, konflik vertikal, dan terorisme.

A. Dampak Bencana

Dampak bencana dalam Nurjanah et al. (2013:35) yaitu yang timbul dari kejadian bencana yang berupa korban jiwa, luka, pengungsian, kerusakan pada infrastruktur/aset, lingkungan/ekosistem, harta benda, penghidupan, gangguan pada stabilitas sosial, ekonomi, politik, hasil-hasil pembangunan, dan dampak lainnya yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Menurut Nurjanah, et al. (2013:35) dampak bencana dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

1. Dampak Langsung (*direct impact*), meliputi kerugian finansial dari kerusakan aset ekonomi, misalnya rusaknya bangunan seperti tempat tinggal dan tempat usaha, infrastruktur, lahan pertanian dan lain-lain, yang dalam istilah ekonomi disebut *stock value*.
2. Dampak tidak langsung (*indirect impact*) meliputi berhentinya proses produksi, hilangnya output dan sumber penerimaan, yang dalam istilah ekonomi disebut *flow value*.
3. Dampak sekunder (*secondary impact*) atau dampak lanjutan. Contohnya: terhambatnya perubahan ekonomi, terganggunya rencana pembangunan yang telah disusun, meningkatnya defisit neraca pembayaran, meningkatnya angka kemiskinan dan lain-lain.

Sedangkan menurut Nurjanah, et al. (2013:38) akibat bencana dalam suatu komunitas dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu:

1. Bagi manusia, berupa meninggal dunia, hilang, cedera atau luka, sakit, cacat, dan gangguan sosial psikologis lainnya, pengungsian, bercerai-berai (berpisahnya anggota keluarga), dan kehilangan pekerjaan.
2. Kerusakan lingkungan, berupa kerusakan pada tanah, udara, dan air.
3. Kerusakan sarana dan prasarana umum, seperti perkantoran, sekolah, tempat ibadah, jalan, sarana penerangan, sarana komunikasi, sarana air bersih.
4. Terganggunya pelayanan umum, seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, pemerintahan, ekonomi dan sebagainya.
5. Kerusakan atau kehilangan harta benda, seperti rumah, perabotan rumah tangga, surat-surat berharga, dan sebagainya.

2.1.4 Tinjauan Tentang Gempa Bumi

2.1.4.1 Definisi Gempa Bumi

Gempa bumi merupakan peristiwa alam yang kejadiannya belum bisa diramalkan dan dapat menimbulkan kerugian material hingga merenggut korban dan nyawa manusia (Subagia, Wiratma, & Sudita, 2015). Bencana gempa bumi dan juga letusan gunung api merupakan bencana alam yang tidak dapat dicegah dari sumbernya (Suhardjo, 2010). Gempa bumi yang umum terjadi di Indonesia berdasarkan penyebabnya terdapat 3 jenis yaitu, gempa yang bersumber dari pergeseran lempeng tektonik, gempa yang bersumber dari erupsi gunung vulkanik dan gempa yang bersumber dari pergerakan kerak dangkal (*shallow crustal carthquake*) (Gustiansyah, 2019). Indonesia juga mempunyai 129 gunung api yang aktif serta memiliki 271 titik erupsi yang merupakan konsekuensi dari interaksi dan

tumbukan antara beberapa lempeng benua (Abidin, 2008).

Gempa bumi dapat menimbulkan kerusakan tidak hanya pada bangunan tempat tinggal tetapi juga elemen infrastruktur seperti jalan, telekomunikasi, rumah sakit dan sekolah (Baytiyeh, 2014a). Gempa bumi telah terbukti menjadi salah satu bahaya alam yang paling menakutkan dan mahal yang dapat menimbulkan ancaman nyata dan serius terhadap infrastruktur, populasi, ekonomi, dan struktur sosial negara (Baytiyeh & Naja, 2015). Pada umumnya masyarakat tahu mengenai risiko bahaya gempa bumi, akan tetapi mereka belum tahu mengenai tindakan yang harus dilakukan (H. Wu et al. 2017). Ketidaktahuan mengenai gempa bumi merupakan salah satu penyebab banyaknya korban, baik terluka maupun meninggal (Rohman, 2016). Kesadaran risiko merupakan faktor penting bagi individu dalam proses mengambil tindakan untuk gempa bumi (Tekeli-yesil et al. 2018). Begitupun dengan sosialisasi mengenai bencana gempa bumi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, tetapi dampaknya tidak berlangsung lama (Baytiych, 2014b)

2.1.5 Tinjauan Sesar Lembang

Sudah banyak diketahui bahwa gempa bumi yang terjadi yaitu akibat pergerakan sesar atau fault yang dapat menimbulkan sejumlah bencana, seperti korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerusakan pada berbagai struktur bangunan, terjadinya longsor, dan lain-lain. Wilayah Indonesia sendiri mempunyai banyak sesar aktif yang kawasannya relatif berpenduduk cukup padat. Begitupun di kawasan Jawa barat mempunyai beberapa sesar aktif. Melalui beberapa program Riset ITB, KK Geodesi juga melakukan studi terhadap aktivitas beberapa sesar (*fault*) di Jawa Barat, yaitu Sesar Cimandiri. Sesar Lembang dan Sesar Baribis (Abidin. 2008).

2.2.5.1 Definisi Sesar Lembang

Bencana sesar adalah rekahan yang mengalami pergeseran yang jelas. Sesar atau patahan adalah suatu struktur geologi yang berupa bidang tekahan atau zona rekahan pada batuan yang sudah mengalami pergeseran (Gustiansyah, 2019). Sesar Lembang merupakan patahan di dalam bumi yang melintang dari timur ke barat di utara cekungan Kota Bandung hingga sepanjang 29 kilometer. Dengan panjang 29 kilometer ini menunjukkan bahwa Sesar Lembang dapat menghasilkan gempa 6,5-7,0 Mw dengan waktu pengulangan 170-670 tahun (Daryono, Natawidjaja, Sapiie, & Cummins, 2018). Sesar Lembang menunjukkan bukti geomorfik yang jelas tentang aktivitas terkini dan telah lama dianggap aktif (Daryono et al., 2018). Namun disayangkan masih banyak masyarakat yang tinggal di sekitar Lembang belum mengetahui bahaya mengenai pergerakan Sesar Lembang ini

Sesar aktif tergolong sesar normal dan mempunyai potensi ancaman gempa bumi dengan kekuatan 6.7 SR (Heri & Caesar, 2018). Berdasarkan publikasi ilmiah tesis mahasiswa Studi Sains Kebumihan Institut Teknologi Bandung. Didik Wahyu Widjaja menyatakan bahwa gempa bumi yang bersumber dari sesar aktif Lembang dapat mengakibatkan kerusakan yang tidak hanya untuk wilayah Lembang, namun juga berpotensi menyebabkan kerusakan untuk wilayah Kabupaten Bandung dan Kota Bandung (Heri & Caesar, 2018).

2.1.6 Tinjauan tentang Pekerjaan Sosial

2.1.6.1 Definisi Pekerjaan Sosial

Max Siporin dalam Adi Fahrudin (2014) memberikan penjelasan mengenai definisi pekerjaan sosial sebagai berikut:

"social work is defined as a social institutional method of helping people to

prevent and resolve their social problems to store and enhance their social functioning".

Pekerjaan sosial didefinisikan sebagai suatu metode institusi sosial untuk membantu orang mencegah dan memecahkan masalah mereka serta untuk memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian sosial mereka.

Profesi pekerjaan sosial meningkatkan perubahan sosial, pemecahan masalah dalam hubungan-hubungan manusia serta pemberdayaan dan pembebasan orang untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan menggunakan teori-teori perilaku manusia dan sistem sosial, pekerjaan sosial melakukan intervensi pada titik-titik tempat orang berinteraksi dengan lingkungannya Prinsip-prinsip hak asasi dan keadilan sosial merupakan dasar bagi pekerjaan sosial.

2.1.6.2 Definisi Pekerjaan Sosial dengan Bencana

Edi Suharto, dkk (2011) menjelaskan Pekerjaan Sosial bidang Penanggulangan Bencana (PSPB) ini menggunakan konsep dan teknik yang sudah ada pada pekerjaan sosial pada umumnya. Dalam pelaksanaannya fokus PSPB ini dibagi menjadi situasi tanpa bencana, pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana yang masing-masing memiliki proses yang berbeda karakter satu dari yang lainnya.

Pekerja sosial dalam bencana ini dalam pelaksanaannya menekankan pada pentingnya interaksi orang dengan lingkungan sosialnya, disesuaikan dengan status fungsi dan peran sosial baik pada tataran individu, keluarga, kelompok dan masyarakat pada berbagai tahapan penanggulangan bencana. Maka dari itu, prinsip pekerja sosial penanggulangan bencana ini dilandasi oleh prinsip-prinsip

kemanusiaan, keadilan, kesamaan, kedudukan hukum dan pemerintahan, keseimbangan, keselarasan dan keserasian, ketertiban dan kepastian hukum, kebersamaan dan kelestarian lingkungan hidup. Seperti pekerja sosialnya lainnya, peksos PB harus mematuhi semua standarisasi ini dan memiliki pelatihan sesuai yang ditentukan oleh lembaga yang berwenang.

Menurut Zakour dalam Dede Kuswanda et al. (2009) bahwa perspektif pekerjaan sosial, lingkungan termasuk lingkungan fisik, biologi dan sosial merupakan faktor yang mempengaruhi kesejahteraan individu, kelompok dan masyarakat. Bahkan sejak akhir abad ke-19, pekerja sosial telah memberi perhatian pada intervensi lingkungan mikro seseorang untuk meningkatkan status kesehatan, lingkungan kehidupan tempat tinggal, kondisi tempat kerja dan keberfungsian sosial dan psikologis.

Pekerjaan sosial bencana adalah suatu bidang kerja profesi pekerjaan sosial yang menuntut keahlian khusus sesuai dengan tahapan penanggulangan bencana. Mengingat penanggulangan bencana itu bersifat multidisipliner yang melibatkan berbagai profesi maka dipandang perlu untuk mengidentifikasi karakteristik yang membedakan pekerjaan sosial dari profesi lainnya.

Pekerjaan sosial penanggulangan bencana didasarkan pada asumsi bahwa penanggulangan bencana mempunyai hubungan sebab akibat secara langsung dan timbal balik dengan fungsi sosial individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.

2.1.6.3 Tujuan Praktik

Edi Suharto,dkk (2011:89) menyebutkan tujuan utama PSPB adalah memberikan pelayanan terbaik dalam menguatkan fungsi sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dalam upaya-upaya berikut ini:

1. Memfasilitasi pengurangan risiko bencana,

2. Membantu peningkatan kesiapsiagaan,
3. Mengembalikan dan menguatkan kembali fungsi dan peran mereka pada saat terkena bencana agar dapat kembali berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat dengan efektif,
4. Membangun kembali fungsi sosial mereka yang terganggu akibat bencana sehingga secara optimal dapat melaksanakan pemulihan dari dampak bencana dan menguatkan kapasitas dan resiliensi terhadap bencana pada masa depan.

2.1.6.4 Peran Pekerja Sosial dengan Bencana

Pekerja sosial bidang penanggulangan bencana ini tentunya memiliki peranan yang penting bagi individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat yaitu agar mereka kembali berfungsi sosial. Beberapa peran yang dapat dilakukan oleh pekerja sosial dalam bidang bencana menurut Tukino (2006:67) yakni:

1. Advokasi Kasus

Advokasi kasus bagi individu maupun kelompok pengungsi yang belum dipenuhi hak-haknya atas bantuan darurat yang harus diterimanya.

2. Pendampingan

Pendampingan kepada para pengungsi dengan memberikan berbagai layanan seperti pemberian informasi, memberikan hiburan serta dukungan.

3. Fasilitator

Memfasilitasi terciptanya iklim yang kondusif dan kondisi yang memungkinkan terjadinya komunikasi antara pekerjaan sosial dengan pengungsi.

4. Konselor

Memberikan layanan konsultasi pekerjaan serta konseling psikososial terhadap para pengungsi yang kehilangan masa depan serta mengalami dampak

psikologis

5. Terapis

Melakukan langkah-langkah penyembuhan dengan berbagai pendekatan terapi psikososial baik secara individu maupun secara kelompok.

2.1.6.5 Metode dan Teknik Pekerjaan Sosial

Pekerja Sosial dalam melakukan pelayanan pertolongan memiliki metode dan teknik yang digunakan. Metode dan teknik tersebut yaitu:

1. Metode

Praktik pekerjaan sosial memiliki tiga metode, yaitu *Social Casework*, *Social Groupwork* dan *Community Development/Community Organization*. *Community Development/Community Organization* juga dikenal dengan *Community Work*, intervensi komunitas, dan ada pula intervensi makro yang pada hakikatnya mengacu pada hal yang sama. Konteks pekerjaan sosial di dalam sebuah komunitas (masyarakat, kebijakan dan organisasi) menggunakan metode intervensi komunitas/*Community Work*.

Community Organization adalah suatu proses untuk memelihara keseimbangan antara kebutuhan-kebutuhan sosial dengan sumber-sumber kesejahteraan sosial dari suatu masyarakat tertentu atau suatu bidang kegiatan tertentu (Arthur Dunham, 1958). *Community Work* adalah suatu proses membantu masyarakat untuk memperbaiki masyarakatnya melalui kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama (Alan Twevetrees, 1993). Masyarakat dalam konteks pengembangan dan pengorganisasian, diartikan sebagai sebuah 'tempat bersama' yakni sebuah wilayah geografi yang sama (Mayo, 1998), misalnya RT,RW,kampung di pedesaan, perumahan di perkotaan. Pengertian

secara umumnya adalah suatu proses untuk membantu masyarakat agar dapat menggali dan menggerakkan sumber- sumber yang ada untuk mengatasi masalah atau memenuhi kebutuhan.

1) Fungsi CO/CD

Pengembangan dan pengorganisasian masyarakat memiliki fungsi antara lain:

- a. Untuk memperoleh data dan fakta sebagai dasar untuk menyusun perencanaan dan melakukan tindakan yang sehat
- b. Memulai mengembangkan dan merubah program dan usaha-usaha kesejahteraan untuk memperoleh penyesuaian yang lebih baik antara sumber-sumber dan kebutuhan
- c. Meningkatkan standar pekerjaan sosial untuk meningkatkan efektifitas kerja dari lembaga-lembaga
- d. Meningkatkan dan memberikan fasilitas interelasi dan meningkatkan koordinasi antara organisasi, kelompok dan individu-individu yang terlibat dalam program dan usaha kesejahteraan sosial
- e. Mengembangkan pengertian umum dari masalah, kebutuhan dan metode pekerjaan sosial
- f. Mengembangkan dukungan dan paertisipasi masyarakat dalam aktifitas kesejahteraan sosial.

Disisi lain, tujuan utama dari pengembangan dan pengorganisasian masyarakat adalah untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada pada mereka serta menekankan pada partisipasi sosial.

Menurut Netting (2004): Intervensi makro merupakan bentuk intervensi

langsung yang dirancang dalam rangka melakukan perubahan secara terencana pada tingkat organisasi dan komunitas. Intervensi memiliki tiga model pendekatan. Menurut Roothman (1995) dalam Isbandi (2008) model pendekatan tersebut adalah *Locality Development*, *Social Action* dan *Social Planning*.

- 1) *Locality Development* merupakan model intervensi yang memandang bahwa perubahan atau pengembangan dalam masyarakat dapat dilakukan sangat baik secara optimal melalui suatu partisipasi aktif dari masyarakat lokal dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat tersebut.
- 2) *Social Action* merupakan model intervensi yang digunakan apabila ada pihak-pihak tertentu yang menindas hak masyarakat sehingga perlu dibantu.
- 3) *Social Planning* merupakan model intervensi yang berkaitan dengan kebijakan dan pelayanan yang ada di masyarakat dengan menekan pada perencanaan sosial. Model ini meyakini bahwa masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan lingkungan yang kompleks memerlukan seorang perencana dalam melakukan proses perubahan.

2. Strategi dan Teknik

Pekerja Sosial dalam melakukan pelayanan pertolongan memiliki teknik digunakan. Praktik pekerja sosial dengan organisasi dan masyarakat yang memiliki teknik yang dibagi kedalam tiga kategori strategi yakni kolaborasi, kampanye dan kontes. Menurut (Brager & Hollow: 1978) dalam Netting (2004).

Lebih mudahnya dijelaskan mengenai ketiga strategi yang di dalamnya terdapat teknik-teknik yaitu dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Strategi dan Teknik

No (1)	Strategi (2)	Taktik (3)	Tujuan (4)
1.	Kolaborasi (suatu relasi pekerjaan dimana sistem sasaran sudah menyetujui/menyepakati bersama sistem kegiatan bahwa perubahan perlu dilakukan dan ada dukungan sistem sumber)	a. <i>Implementation</i>	Pemecahan dari masalah, menyelenggarakan suatu kebutuhan pelayanan.
		b. <i>Capacity building</i> 1. <i>Participation</i> 2. <i>Empowerment</i>	Meningkatkan kemampuan dan kewenangan masyarakat.
2.	Kampanye (Suatu strategi yang digunakan ketika target harus diyakinkan akan pentingnya perubahan)	a. <i>Education</i>	Memberikan pemahaman kepada masyarakat.
		b. <i>Persuative</i> <i>Cooptation Lobbying</i>	Mempengaruhi para pembuat keputusan.
		c. <i>Mass Media Appeal</i>	Merubah opini publik.
3.	Kontes (suatu strategi yang digunakan ketika salah satu sistem menolak perubahan)	a. <i>Bargaining and negotiation</i>	Mendapatkan kesepakatan antara kedua belah pihak.
		b. <i>Large Group Action</i> 1. <i>Legal</i> 2. <i>illegal</i>	Penggantian kekuasaan.
		c. <i>active lawsuit</i>	Mendapat perintah untuk mengadakan aksi.

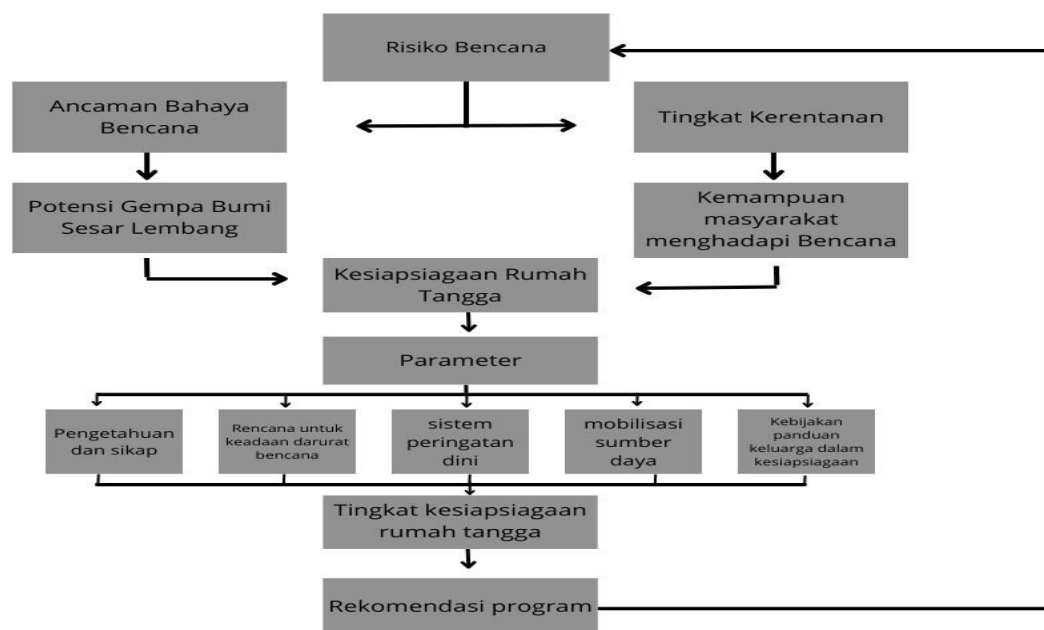
Sumber : Peneliti 2024

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan masalah penelitian dan landasan teori yang telah dijelaskan, maka dibangun kerangka fikir yang dapat menjadi sumber rujukan pengembangan kearah indikator penelitian. Kerangka fikir penelitian ini berawal dari kekhawatiran akan potensi bencana besar yang akan datang di kawasan Bandung Utara khususnya sepanjang jalur Sesar Lembang. Bencana tersebut diperkirakan memiliki resiko yang besar dan berpotensi mengakibatkan banyak kerugian yang mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Salah satu wilayah yang sangat berpotensi terdampak bencana Sesar Lembang tersebut adalah wilayah Dusun palintang Desa Cipanjalu Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung. Pemerintah dan

masyarakat sudah seharusnya mempersiapkan diri akan adanya ancaman potensi bencana Sesar Lembang tersebut salah satunya dengan meningkatkan kesiapsiagaan seluruh elemen yang berpotensi terdampak oleh bencana tersebut.

Pekerja sosial dapat berperan sebagai *Community development officer* yakni pekerja sosial dapat melakukan pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai “Kesiapsiagaan Tokoh Masyarakat dalam Menghadapi Potensi Bencana Gempa Bumi Sesar Lembang di Dusun palintang Desa Cipanjalu Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung” untuk melihat sejauh mana kesiapsiagaan rumah tangga yang berada di Dusun palintang Desa Cipanjalu. Hasil dari penelitian tersebut kemudian dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk pembentukan sebuah program peningkatan kesiapsiagaan masyarakat di wilayah Dusun palintang Desa Cipanjalu Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung.



Gambar 2.3 Kerangka pemikiran penelitian
Sumber: Hasil Penelitian 2024